

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2019

E-Jurnal Akuntansi

E-ISSN: 23028556

Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana bekerjasama dengan IAI Bali

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 27 Nomor 3 Tahun 2019 sampai Volume 31 Nomor 3 Tahun 2023

Jakarta, 08 Agustus 2019

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001



Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan

Baiq Dwi Apryana Eristanti¹

Hermanto²

I Nyoman Nugraha Ardana Putra³

^{1,2,3} Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
e-mail : dwiapryana2016@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar pada 33 OPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Populasi penelitian yaitu pegawai bagian akuntansi dan sampel penelitian sebanyak 99 responden yaitu PPK, bendahara pengeluaran dan staf akuntansi pada 33 OPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Metode statistik yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian hipotesis adalah komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern memperlemah pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu. Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu.

Kata kunci: Ketepatan waktu, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of organizational commitment and regional financial accounting system on the timeliness of financial reporting with the internal control system as a moderating variable. The data collection of this study used a questionnaire distributed on 33 OPD in the West Lombok Regency Government. The population of the study were accounting staff and a sample of 99 respondents, namely PPK, expenditure treasurer and accounting staff at 33 OPD in the West Lombok Regency Government. The statistical method used is Moderated Regression Analysis (MRA). The result of hypothesis testing are organizational commitment and regional financial accounting system have a positive effect on the timeliness of financial reporting. The internal control system weakness the influence of organizational commitment on timeliness. Internal control system strengthens the influence of the regional financial accounting system on timeliness.

Keywords: *Timeliness, Organizational Commitment, Regional Financial Accounting System, Internal Control System*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-mengevaluasi pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2004).

Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan (Baridwan, dalam (Septiani, 2005). Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*) (Yuliani dkk, 2016).

Faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah Sistem pengendalian intern (SPI). Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Fitrawansah, 2015). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani dan Tahar, 2015). Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (Rasdianto, 2013). Murapi (2016) menyatakan semakin diterapkan SAKD akan semakin baik prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam rangka pertanggung jawabannya pelaksanaan APBD menjadi berkualitas.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang

tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat (Modo dkk, 2009). Menurut Namada (2014) dalam (Satriajaya dkk, 2018) menyatakan bahwa tiap anggota tim dalam sebuah organisasi harus memberikan partisipasi nyata dengan bekerjasama serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Luthans (2006) dalam Aritonang (2009) menyatakan semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan.

Lombok Barat merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membuat laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak 2014 – 2017. Meskipun mendapatkan opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun selalu memberikan rekomendasi terkait sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan kurangnya komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern disini terkait dengan banyaknya rekomendasi terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang di lakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang terus terulang setiap tahun. Permasalahan ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan kepada BPK juga terjadi di pemerintah kabupaten Lombok barat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang akan menjadi kesenjangan penelitian (*Research gap*) dari penelitian ini yaitu hasil penelitian Sembiring (2013) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan. Rosalind dan Kawedar (2011) mendapatkan hasil

penelitian yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi secara positif berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi secara positif berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

Hasil penelitian Yendrawati (2013), berupa sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, faktor eksternal dapat digunakan sebagai variabel moderasi pada sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai variabel moderasi pada kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Amalia (2014) menemukan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah namun tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Rachmawati (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah akan tetapi pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Astrawan dkk (2016) menghasilkan Sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Murapi (2016) memperoleh hasil Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian Latifah (2015) menemukan hasil bahwa hanya standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Mokoginta dkk (2017) membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini berarti sistem pengendalian intern pada BPKAD Bolaang Mongondow utara yang telah dijalankan sudah baik namun dalam penerapannya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan yang berada di BPAKD Bolaang Mongondow utara sudah memahami prosedur akuntansi sampai dengan menjadi laporan keuangan sehingga memungkinkan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Mutiana dkk (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Utara). Penelitian ini mengganti variabel kualitas laporan keuangan menjadi lebih spesifik menjadi ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta mengganti variabel Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan variabel Sistem Pengendalian Intern yang pada penelitian ini diubah menjadi variabel moderasi dari hubungan komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini mengganti lokasi penelitian yang pada menggunakan Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara menjadi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini termotivasi dari adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten (*research gap*), serta belum ada penelitian tentang sistem akuntansi keuangan daerah yang spesifik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan adanya kesenjangan penelitian (*Research gap*) diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat? (2) Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat? (3) Apakah Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat? (4) Apakah Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah yaitu (1) Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, (2) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, (3) Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, (4) Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991). *Stewardship theory* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan - tujuan individu melainkan *Stewardship theory* lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri, 2005).

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principal dan manajemen. *Stewardship theory*

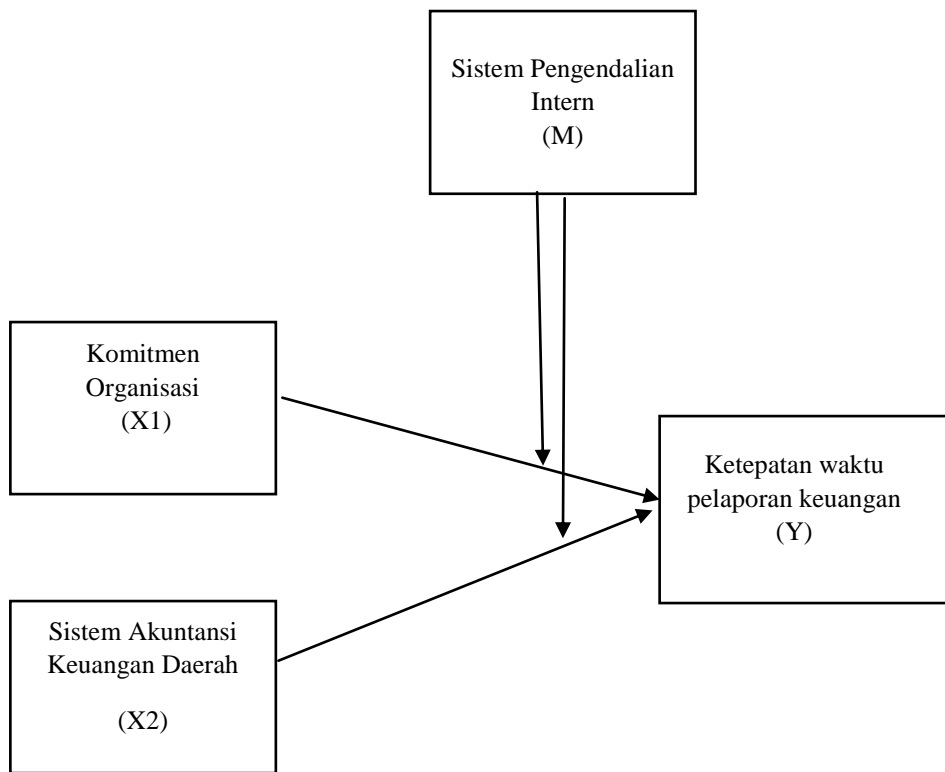
dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Haliah (2012) dalam Kurniatun (2013) mengungkapkan bahwa *Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, yang sejak awal perkembangan akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Kondisi perkembangan organisasi sektor publik semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi publik, dan *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi-fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Adanya berbagai keterbatasan, menyebabkan pemilik sumber daya (*capital supplier/principal*) mempercayakan (*trust*= amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah=*trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. (Mardiasmo, 2004) menjelaskan dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Septiani (2005), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai

kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Rosalin dan Kawedar, 2011).

Secara sistematis, rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Rerangka konseptual penelitian

Sumber: Data diolah, 2018

Menurut Jaros (2007) dalam Mutiana dkk (2017) Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Luthans (2006) dalam Aritonang (2009) menyatakan semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan

timeliness pelaporan keuangan. Hasil penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) dan Rachmawati (2014) menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

Menurut Mardiasmo (2004) Selain Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang mempengaruhi informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo,2004:35). Menurut Bastian (2007:4), Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan.

Hasil penelitian Drama (2014), Murapi (2016) dan Latifah (2015) menghasilkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, maka secara tidak langsung laporan keuangan akan mengikuti alur dari sistem baik manual ataupun yang sudah terkomputerisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Nurillah dan Muid (2014) sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan serta tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada pemerintahan. Menurut

Fitrawansah (2015) jika penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat (Modo dkk, 2009).

Hasil penelitian Sembiring (2013), Yendrawati (2013), Astrawan (2016) dan Mokoginta dkk (2017) mendapatkan hasil penelitian Sistem Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Dengan adanya sistem pengendalian intern, maka akan membuat komitmen organisasi semakin tinggi. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun akan menjadi berkualitas dan selesai tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

Mardiasmo (2004:35) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila

informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Astrawan dkk, 2016).

Hasil penelitian Sembiring (2007), Yendrawati (2013), Astrawan dkk (2016) dan Mokoginta dkk (2017) mendapatkan hasil penelitian Sistem Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Sistem pengendalian intern akan membuat sistem akuntansi keuangan daerah mematuhi peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan baik secara manual maupun terkomputerisasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2012:37) Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat dimana terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel yang dipengaruhi (dependen).

Menurut Sugiyono (2013:80) populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi pada 33 OPD pemerintah kabupaten Lombok barat. Menurut Sugiyono (2013:81)

sampel didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan metode *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti antara lain : a). Pegawai Negeri Sipil, b) Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ keuangan, c) Pegawai yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara pengeluaran dan staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan. Jumlah sampel pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebanyak 3 (tiga) responden.

Secara operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Komitmen Organisasi diukur dengan indikator : Identifikasi (*identification*), Keterlibatan (*identification*), dan Loyalitas (*identification*). Diukur dengan skala *likert* 5 (lima) point.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) diukur dengan indicator :Kesesuaian sistem dengan SAP, Pengidentifikasian transaksi, Pencatatan transaksi, Bukti disetiap transaksi, Pencatatan kronologis, Pengklasifikasian transaksi,

Pengklasifikasian transaksi dan Laporan keuangan setiap periode. Diukur dengan skala *likert 5* (lima) point.

Ketepatan atau ketepatwaktuan laporan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan, (PP No. 71 Tahun 2010). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan diukur dengan indikator : Tersedianya informasi saat dibutuhkan dan Laporan yang sistematis dan teratur. Diukur dengan skala *likert 5* (lima) point.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern diukur dengan indikator : lingkungan pengendalian terhadap tugas, penilaian resiko terhadap kegiatan, kegiatan pengendalian terhadap transaksi, informasi dan komunikasi terhadap laporan kegiatan dan pemantauan terhadap mekanisme. Diukur dengan skala *likert 5* (lima) point.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS , untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji analisis kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabelitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Pengujian hipotesis penelitian

dilakukan dengan menggunakan model *Moderated Regretion Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2013) . Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3M + b_4(X_1.M) + b_5(X_2.M) + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y = ketepatan waktu pelaporan keuangan
- X1 = Komitmen Organisasi
- X2 = sistem akuntansi keuangan daerah
- M = sistem pengendalian intern
- a = konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0
- b = arah koefisien regresi
- ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Barat. Berikut ini adalah tabel perincian penyebaran dan pengembalian kuesioner :

Tabel 1.
Penyebaran kuesioner dan pengembaliannya

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusi	99
Kuesioner yang tidak kembali	11
Kuesioner yang kembali	88
Tingkat pengembalian kuesioner	88 %

Sumber : Data diolah, 2018

Dari data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 88%. Kuesioner yang di distribusikan sebanyak 99 kuesioner yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang terdapat di

33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Barat. Kuesioner yang kembali sebanyak 88 dari 99 kuesioner yang disebar, sehingga ada 11 kuesioner yang tidak kembali.

Pengujian validitas untuk setiap pertanyaan pada kuesioner dapat dilihat dari nilai validitas pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Ketentuan uji validitas, jika nilai *corrected item-total correlation* (r-hitung) dari setiap butir pertanyaan lebih besar dari r-tabel maka dinyatakan valid. Pada penelitian ini, untuk r-tabel dari df (n-2) pada $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan pada variabel dependen, variabel independen dan variabel moderating adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r-hitung masing-masing item yang lebih besar dari nilai r-tabel.

Pengujian reliabilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah jika koefisien reliabilitas yang didapat 0,6 jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Pada penelitian ini, variabel komitmen organisasi (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), ketepatan waktu (Y) dan sistem pengendalian intern (M) memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau andal.

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berikut tabel hasil penelitian uji *Kolmogorov Smirnov* :

Tabel 2.
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Unstandardized Residual		
N		88
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.52941237
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.620
Asymp. Sig. (2-tailed)		.837

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,837. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $0,837 > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa melalui uji *Kolmogorov Smirnov* terbukti data residual terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Berikut adalah tabel hasil uji Glejser :

Tabel 3.
Hasil Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	1.879	1.190		1.578	.118
	X1	-.015	.047	-.055	-.325	.746
	X2	.003	.057	.010	.061	.951
	M	-.018	.040	-.060	-.453	.652

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji *glejser* diatas, didapatkan nilai probabilitas signifikansi variabel Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF yang bias ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel-variabel independen < 10, berarti tidak ada Multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinieritas :

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.680	2.198		.764	.447		
	X1	.444	.086	.485	5.147	.000	.405	2.467
	X2	.040	.105	.033	.383	.703	.490	2.040
	M	.440	.075	.432	5.901	.000	.673	1.487

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dari hasil pengujian didapatkan nilai *Tolerance* variabel independen tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolonieritas.

Hasil uji analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.
Regresi linier berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	7.499	2.361		3.176	.002
	X1	.659	.094	.715	6.998	.000
	X2	.061	.126	.049	.482	.631
	R square					.564
	Adjusted R Square					.554

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$Y = 7,499 + 0,659 X1 + 0,061 X2 + \varepsilon$$

Nilai koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi bernilai positif dengan nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05 yaitu 0,000, sedangkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah bernilai positif dengan signifikansi uji t lebih dari 0,05 yaitu 0,631. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel ketepatan waktu, sedangkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketepatan waktu. Nilai R Square pada analisis regresi linier berganda sebesar 0,564. Hal ini berarti bahwa sebesar 56,4 persen ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Analisis *Moderated Regrestion Analysis* (MRA) atau uji interaksi, analisis ini digunakan untuk mengetahui efek interaksi antara variabel komitmen organisasi (KO), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai variabel moderasi.

Berikut adalah hasil uji *Moderated Regretion Analysis* (MRA) :

Tabel 6.
Hasil Uji *Moderate Regression Analysis*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-32.023	17.286		-1.853	.068
	X1	3.852	.798	4.206	4.830	.000
	X2	-2.132	1.057	-1.739	-2.018	.047
	M	1.609	.638	1.579	2.521	.014
	X1M	-.129	.030	-6.459	-4.234	.000
	X2M	.087	.041	3.554	2.123	.037
	R Square					.764
	Adjusted R Square					.749

Sumber : Data diolah, 2018

Berikut persamaan regresi berdasarkan tabel hasil uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) diatas :

$$Y = -32,023 + 3,852X1 - 2,132X2 + 1,609M - 0,129X1M + 0,087X2M + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil uji analisis regresi moderasi, Hipotesis pertama (H1) menyatakan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rosalin & kawedar (2011) dan Rachmawati (2014) yang menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu, dan tidak sejalan dengan penelitian Amalia (2013) yang mendapatkan hasil komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Hal ini kemungkinan dikarenakan, karena pengelola keuangan pada pemerintah kabupaten Lombok barat memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Komitmen organisasi yang tinggi akan membuat pengelola keuangan bersungguh-sungguh dalam

menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut menyajikan informasi yang tepat waktu. Dalam konteks teori penatalayanan (*Stewardship theory*), Pengelola keuangan akan lebih banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelola keuangan akan menjadi konsisten dan patuh terhadap organisasinya karena memiliki kesadaran bahwa memiliki komitmen terhadap organisasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Pengelola keuangan yang memiliki komitmen yang tinggi akan lebih fokus dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Drama (2014) dan Murapi (2016) yang menghasilkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Latifah (2017) mendapatkan hasil Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan semakin berkualitas serta tepat waktu pula laporan keuangan yang disajikan. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan sesuai dengan prosedur, dari pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan lebih memberikan

kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan sistem akuntansi ini memiliki prosedur dan standar yaitu standar akuntansi pemerintah sebagai acuan, ketika sistem ini tidak sesuai prosedur dan standarnya maka akan berimbas pada kualitas laporan keuangan, baik itu keterandalan serta ketepatan waktu pelaporannya. Ketika pada suatu daerah sistem akuntansi keuangan daerahnya buruk, maka bisa disimpulkan bahwa laporan keuangannya tidak berkualitas.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yendrawati (2013), dan Mokoginta dkk (2017) yang mendapatkan hasil berupa Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak sejalan dengan penelitian Sembiring (2007) dan Astrawan (2016) mendapatkan hasil penelitian Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu. Dengan adanya komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern yang baik, pengelola keuangan akan mampu membuat laporan keuangan yang tepat waktu. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), diterapkannya sistem pengendalian intern, menuntut pengelola keuangan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Dalam konteks teori penatalayanan (*stewardship theory*), pengelola keuangan yang sangat fokus terhadap

tujuan dari organisasi akan membuat laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang sesuai dengan sistem dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lombok barat dalam hal ini sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian intern membuat pengelola keuangan menjadi sangat fokus dan teliti dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal tertentu, ketika mengejar keakuratan atau keandalan untuk mencapai kebermanfaatan informasi laporan keuangan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu ketepatan waktu dari laporan keuangan tersebut.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,037 < 0,05$ sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil ini sejalan dengan Sembiring (2007) dan Astrawan dkk (2016) mendapatkan hasil penelitian Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu. Hal ini kemungkinan dikarenakan, Pemerintah kabupaten Lombok Barat telah menerapkan sistem pengendalian intern dalam pelaporan keuangannya, sehingga memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern meminimalisir kesalahan dalam sistem akuntansi

keuangan daerah, sehingga penyusunan laporan keuangan bisa tepat waktu. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), kepatuhan pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban merupakan suatu hal yang wajib dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan lebih memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan didukung pengendalian intern yang baik, maka akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, simpulan yang diperoleh adalah penelitian Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengelola keuangan pada pemerintah kabupaten Lombok barat memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kabupaten Lombok barat sudah bagus. Sistem Pengendalian Intern memperlemah pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan adanya sistem pengendalian intern membuat pengelola keuangan menjadi sangat fokus dan teliti dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Sangat fokus dan teliti pengelola keuangan dikarenakan

banyaknya aturan yang harus dipatuhi oleh pengelola keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini kemungkinan dikarenakan sistem pengendalian yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Lombok barat sudah bagus. Sistem pengendalian intern yang bagus, membuat tidak adanya kesalahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga penyusunan laporan keuangan bisa tepat waktu.

Saran yang dapat peneliti usulkan berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas adalah untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, diharapkan dapat memperluas obyek penelitian, misalnya dengan meneliti 2 atau 3 pemerintah kab/kota dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik observasi langsung, sehingga jawaban dari responden lebih detail.

REFERENSI

- Amalia Iga. (2014). Analisis Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Way Kanan).
- Aritonang, A. S. dan F. S. (2009). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Astrawan, Kadek Pande, Made Arie Wahyuni, dan N. T. H. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, kapasitas SDM, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, xx.

- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Drama, H. (2014). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening (studi empiris pada SKPD Kota Solok). Universitas negeri padang.
- Fitrawansah. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai). Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri alauddin Makassar.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R. dan A. T. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Kurniatun. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Mataram*. Magister Akuntansi Universitas Mataram.
- Latifah, A. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul). Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (Kedua). Yogyakarta: ANDI.
- _____. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (keempat). Yogyakarta: ANDI.
- Modo, Sintike Mentari, David Paul Elia Saerang, dan A. T. P. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud), 14–30.
- Mokoginta, Novtania, L. L. dan W. P. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.

- Murapi, ikang. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Infestasi*, 12(2), 131–143.
- Mutiana, Liza, Yossi Diantimala, dan Z. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167.
- Nurillah, As Syifa, D. M. (2014). . Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Rachmawati, A. (2014). Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Rosalin, F. dan warsito kawedar. (2011). faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (studi pada BLU di kota Semarang).
- Satriaajaya, Johan, Lilik Handajani, I. nyoman N. A. P. (2018). Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 1–21.
- Sembiring, F. L. (2013). Pengaruh kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi Informasi dan SPI terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (studi empiris pada pemerintah kota Padang). Universitas Negeri Padang.
- Septiani, A. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
-
- .(2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Tuasikal, A. (2007). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 08(01).

Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *JAAI*, 17(2), 166–175.

Yuliani, Nur Laila, Barkah Susanto, dan F. (2016). Analisis Determian keandalan dan Timeliness pelaporan keuangan. *JAFFA*, 04(2), 145–160.

-----, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah